POLITIK HUKUM KEPERSERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DALAM PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH
KARENA JUAL BELI
REZKI RAMADHAN NAWAWI, Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Amiruddin dan Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013.

Dewata, Mukti Fajar Nur dan Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan I, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.

Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia*, *Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Edisi Revisi, Cetakan 19, Jakarta, Djambatan, 2008.

HS, Salim, *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016.

Ma'ruf, Umar, *Politik Hukum di Bidang Pertanahan*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010.

MD, Moh. Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, Jogjakarta, LP3S, 1998.

_____, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.

_____, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, 2020.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004.

Murti, Bhisma, *Dasar-dasar Asuransi Kesehatan*, Cetakan ke 6, Yogyakarta, Kanisius, 2007.

POLITIK HUKUM KEPERSERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DALAM PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH
KARENA JUAL BELI
REZKI RAMADHAN NAWAWI, Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Mustofa, *Tuntunan Pembuatan Akta-Akta PPAT*, Yogyakarta, Karya Media, 2014.

Muwahid, *Pokok-Pokok Hukum Agraria di Indonesia*, Cetakan I, Surabaya, UIN Sunan Ampel Press, 2016.

Nugroho, Sigit Sapto, *et. al*., *Hukum Agraria Indonesia*, Solo, Kafilah Publishing, 2017.

Prakoso, Abintoro, *Politik Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2019.

Putri, Asih Eka, *Paham Jaminan Kesehatan Nasional*, Jakarta, Friedrich Ebert Stiftung, 2014.

Setiabudi, Jayabudi, *Panduan Lengkap Mengurus Tanah Rumah Serta Segala Perizinannya,* Yogyakarta, Buku Pintar, 2013.

Silalahi, Ulber, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung, Refika Aditama, 2009.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1981.

_____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta,UI Press, 1986.

Sumarja, FX, *Hukum Pendaftaran Tanah,* Bandar Lampung, Penerbit Universitas Lampung, 2010.

Sumitro dan Hanitijo, Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983.

Syaukani, Imam dan Thohari, A. Ahsin, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Depok, PT. Raja Grafindo Persada, 2018.

B. Jurnal/Artikel/Tesis/Disertasi

Anna Febrina Ginting, et al., "Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Manado", *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 3, Nomor 400, Oktober, 2016.

Mahmudah, Khairiyatul, "Politik Hukum Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Untuk Kepentingan Umum dalam Perspektif Hukum Pertanahan", Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2021.

POLITIK HUKUM KEPERSERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DALAM PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH
KARENA JUAL BELI
REZKI RAMADHAN NAWAWI, Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Paramita, Justisia Pradnya, "Politik Hukum Di Bidang Pendaftaran Tanah", Tesis Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2011.

Rachmad, Suhanda, "Jaminan Kesehatan dan Managed Care", *Jurnal Kedokteran Syiah Kuala*, Volume 15, Nomor 2, Agustus, 2015.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893.

POLITIK HUKUM KEPERSERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DALAM PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH
KARENA JUAL BELI
REZKI RAMADHAN NAWAWI, Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Surat Edaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Nomor 5/SE-400.HK.02/II/2022 tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Karena Jual Beli.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
POLITIK HUKUM KEPERSERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DALAM PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA JUAL BELI
REZKI RAMADHAN NAWAWI, Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Surat Edaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sekretariat Jendral Nomor HK.02/1376/VIII/2022 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Surat Edaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Nomor 5/SE-400.HK.02/II/2022 tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Karena Jual Beli.

D. Internet

Admin Berita, "Kartu Bpjs Kesehatan Jadi Syarat Jual Beli Tanah Mulai 1 Maret 2022", pada https://ppid.atrbpn.go.id/bpn/content/details?key=kartu-bpjs-kesehatan-jadi-syarat-jual-beli-tanah-mulai-1-maret-2022, (diakses pada tanggal 28 Oktober 2022).

Admin BPJS, BPJS Kesehatan, "Tugas dan Fungsi BPJS Kesejatan", pada https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/pages/detail/2021/30, (diakses pada 31 Januari 2023).

Ady Thea DA, Hukum Online.com, "Kepesertaan JKN Jadi Syarat Jual Beli Tanah, Ini Alasan Menteri ATR", pada https://www.hukumonline.com/berita/a/kepesertaan-jkn-jadi-syarat-jual-beli-tanah-lt6214ac8840a80/?page=2, (diakses tanggal 20 Februari 2023).

Dewan Jaminan Sosial Nasional, "Jaminan Kesehatan", pada https://www.djsn.go.id/sjsn/program-sjsn/jaminan-kesehatan, (diakses pada tanggal 18 Januari 2023).

Humas, BPJS Kesehatan, "Sejarah Perjalanan Jaminan Sosial di Indonesia", pada https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2013/4, (diakses pada tanggal 18 Januari 2023).

Humas, BPJS Kesehatan, "Sukses Pertahankan WTM, Ini Sejumlah Capaian BPJS Kesehatan di Tahun 2021", pada https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/post/read/2022/2341/Sukses-Pertahankan-WTM-Ini-Sejumlah-Capaian-BPJS-Kesehatan-di-Tahun-2021, (diakses tanggal 18 Januari 2023).

UNIVERSITAS GADJAH MADA
POLITIK HUKUM KEPERSERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DALAM PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA JUAL BELI
REZKI RAMADHAN NAWAWI, Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Humas, BPJS Kesehatan, "Tindak Lanjuti Inpres 1/2022, BPJS Kesehatan – Kementerian ATR/BPN Perkuat Kolaborasi", pada https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/post/read/2022/2235/Tindak-Lanjuti-Inpres-12022-BPJS-Kesehatan-Kementerian-ATRBPN-Perkuat-Kolaborasi, (diakses tanggal 05 Juli 2023).

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, "Nota Kesepahaman", pada https://jdih.atrbpn.go.id/nota-kesepahaman, (diakses tanggal 20 Februari 2023).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Instruksi", pada https://kbbi.web.id/instruksi, (diakses tanggal 25 Maret 2023).

Mochamad Januar Rizki, Hukum Online.com, "Persyaratan BPJS Kesehatan Diklaim Tidak Hambat Jual-Beli Tanah", pada https://www.hukumonline.com/berita/a/persyaratan-bpjs-kesehatan-diklaim-tidak-hambat-jual-beli-tanah-lt622b37aa142c5/, (diakses tanggal 25 Maret 2023).

United Nations Information Centre, "Universal Declaration of Human Rights – Indonesian", pada https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/indonesian, (diakses pada tanggal 18 Januari 2023).

United Nations Population Division. World Population Prospects: 2022 Revision, "Population, Total – Indonesia", https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?end=2021&locations=ID&start=1960&view=chart, (diakses tanggal 18 Januari 2023).

Vina, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "JKN adalah Model Baru Pelayanan Kesehatan Indonesia", pada https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/5070/JKN-adalah-Model-Baru-Pelayanan-Kesehatan-Indonesia.html, (diakses pada tanggal 18 Januari 2023).